
PERAN R20 DAN BENTUK KRITIK TERHADAP SEKULARISASI**Dewa Putu Bhagastya Dharma, Ni Putu Ayu Gita Shanti Pratiwi, Keisha Patricia Pattalala**

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Email: bhagastyadharna@gmail.com, shantipratiwi28@gmail.com,
kysapatricia@gmail.com

Abstrak

Keberagaman umat manusia dalam memeluk kepercayaan menjadi ladang dalam membangun suatu suara yang kuat di kompetisi politik. Adanya penyatuan antara agama dan politik untuk mencapai suatu tujuan menciptakan berbagai pertentangan karena kedua hal tersebut tidak seharusnya digabungkan dengan membawa ide sekularisme. Sekularisme berfokus dalam memisahkan kepentingan politik dengan kepentingan agama. Dalam penelitian ini kami berfokus pada R20, yang merupakan kegiatan yang mengundang berbagai kepala negara serta pemuka agama yang tidak hanya terfokus mengenai masalah agama, namun terfokus dalam pembahasan konflik global, seperti masalah lingkungan, ekonomi, sosial, hingga politik. Penelitian ini diangkat menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data dari literatur online. Melalui metode ini, penelitian yang dilakukan berupaya dalam menjelaskan terkait kegiatan R20 yang telah dilaksanakan itu merupakan salah satu upaya dalam mengkritik ide sekularisme yang menginginkan agama tidak diikutsertakan dalam aspek politik. Pelaksanaan R20 membuktikan bahwa seberapa kuat pun keinginan dalam memisahkan agama dan politik tidak akan melupakan bahwa kedua aspek tersebut akan selalu berdampingan, baik itu politik yang berlandaskan ajaran agama atau agama yang menggerakkan politik.

Kata Kunci : Sekularisme, Agama, Politik, R20

Abstract

The diversity of human beliefs becomes a fertile ground for building a strong voice in political competition. The fusion of religion and politics to achieve a goal creates various conflicts because these two elements should not be combined while carrying the idea of secularism. Secularism focuses on separating political interests from religious interests. In this research, we focus on R20, which is an activity that invites various heads of state and religious leaders, not only focusing on religious issues, but also on global conflicts such as environmental, economic, social, and political issues. This research adopts a qualitative method with data collection from online literature. Through this method, the research aims to explain the R20 activities that have been carried out as an effort to criticize the idea of secularism, which seeks to exclude religion from the political aspect. The implementation of R20 proves that no matter how strong the desire is to separate religion and politics, it should not be forgotten that these two aspects will always coexist, whether it is politics based on religious teachings or religion that drives politics.

Keywords : Secularism, Religion, Politics, R20

Pendahuluan

Keadaan politik dunia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan - perubahan ini terjadi biasanya ditandai oleh berbagai peristiwa yang berdampak besar, contoh yang bisa kita ambil adalah Perang Dingin. Perang Dingin mengubah tatanan atau sistem politik internasional dan politik luar negeri berbagai negara yang dari awalnya berorientasi pada *hard power* atau berfokus pada kekuatan militer yang akhirnya mengubah menjadi fokus *soft power* dan berorientasi pada perkembangan ekonomi yang pesat. Begitu pula bisa kita lihat dalam kondisi politik dunia yang terkadang melepas beberapa bentuk pemahaman dalam konsiderasi pembuatan kebijakan. Apalagi di dalam bentuk dunia yang berfokus pada perkembangan, kemajuan, dan modern.

Kemodernan atau modernitas yang muncul ini mempengaruhi peran agama dalam politik dunia. Modernitas membentuk kesadaran baru, dengan visi rasionalitas yang menempatkan manusia menjadi sosok utama yang sentral, sebuah subjek atau pelaku, serta ukuran kebenaran. Semangat modernitas ini didukung paham otonomi manusia menggugat pengalaman eksistensial manusia pada Yang Transenden, suatu keberadaan yang serba ada dan mengatasi semuanya, suatu yang supernatural dan 'diluar sana'. Secara historis dalam titik modernitas ini, kepercayaan akan yang transenden dapat kita katakan sebagai bentuk memeluk suatu agama berkontradiksi dengan otonomi manusia yang bebas dan mulai terdapat interpretasi ilmiah yang akhirnya merampas kuasa 'Tuhan' dari kehidupan manusia. Krisis religiositas menjadi perbincangan dunia modern (Ahida, 2018).

Agama sebagai institusi religiositas mendapat tempat konkrit akhirnya berhadapan dengan krisis eksistensial ini. Dari perbincangan ini, para ahli merumuskan Sekularisasi yang menjelaskan bahwa konsep ketuhanan harus ditempatkan sesuai dengan fokusnya dan tidak memanipulasi dalam kehidupan manusia. Sekularisasi dalam penelitian kali ini berfokus pada Sekularisasi Politik, hal ini didefinisikan sebagai implikasi pengalihan tanggung jawab tertentu dari otoritas eklesiastikal (agama) kepada otoritas politik. Kita dapat mengartikan bahwa agama harus terpisah dalam urusan politik. Disisi lain, agama sendiri tidak sepenuhnya buruk dalam perannya untuk merawat perbedaan dan membentuk individu yang bersikap baik. Agama juga mengedepankan pengajaran moral dan dapat berperan sebagai norma ketertiban dalam masyarakat. Salah satu contoh bentuk pengajaran agama kepada sikap toleransi dapat dilihat dalam agama Islam. Dalam surah Al-Hujurat:13 yang artinya : "Allah menyampaikan secara jelas bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal" (Djafar, 2020). Selain itu contoh lainnya dapat kita lihat di agama Hindu, melalui berbagai bentuk ajarannya seperti Tri Kaya Parisudha yang mengajarkan kita untuk berpikir yang benar (*manacika*), berkata yang benar (*wacika*), dan berbuat yang benar (*kayika*). Contoh lainnya adalah Tri Hita Karana yang mengajarkan untuk seluruh manusia dapat menjaga hubungan baik dengan Tuhan (*parahyangan*), sesama manusia (*pawongan*), dan dengan segala sesuatu di lingkungan atau alam (*palemahan*) (Suyanto, 2015).

Agama menyimpan peranan besar dalam kehidupan manusia, serta dalam politik dapat berperan baik jika digunakan dengan baik atau sesuai porsinya dan bukan sebagai bentuk tipu muslihat. Agama memiliki kontrol sosial atas individu, melihat agama dapat memengaruhi bagaimana cara hidup masyarakat dan membentuk struktur dalam kehidupan atau cara melakukan suatu hal dalam kehidupan, memberikan agama kekuatan besar. Hal ini didukung oleh Emile Durkheim dalam teori Fungsionalisme yang mengatakan bahwa Durkheim beranggapan bahwa tingkah laku seseorang merupakan akibat "paksaan" aturan perilaku yang datang dari luar individu dan mempengaruhi pribadinya. Dalam konteks ini "paksaan" tersebut dapat dikategorikan sebagai peran agama itu sendiri.

Peran besar agama yang dikatakan harus dipisahkan dari urusan kehidupan manusia terutama urusan politik seolah berpaling dari kontrol besarnya dalam mewujudkan perdamaian dunia. Eksistensi agama dalam menjadi alat perdamaian harusnya bisa lebih

ditekankan. Hal ini dilihat oleh kepresidenan G20 (Group Twenty) oleh Indonesia tahun 2022 lalu. G20 di Indonesia merintis berbagai bentuk *engagement group* lain untuk menangani permasalahan dunia, bentuk diskusi oleh B20 (*Business Twenty*) dalam kepentingan bisnis internasional, peran T20 (*Think Twenty*) yang berfokus pada dampak baik penelitian untuk dunia, serta dalam lingkup agama, dirintis lah R20 (*Religion Twenty*) yang berfokus pada terkait peran agama untuk menjadi solusi permasalahan global bukan malah jadi penyebab.

Oleh karena itu, R20 memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik dunia. Komitmen ini dituangkan dalam komunike R20 dalam poin pertamanya “Kami, para pemimpin agama yang berasal dari Negara Anggota G20 dan negara lainnya di seluruh dunia, memiliki keprihatinan besar akan tantangan global, seperti degradasi lingkungan, bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, kemiskinan, pengangguran, pengungsi, ekstrimisme, dan terorisme. Respons efektif terhadap tantangan ini terasa lebih sulit akibat munculnya persaingan antara dan di tengah kekuatan-kekuatan utama dan kebangkitan konflik berbasis identitas di seluruh dunia, yang mengancam perdamaian dan keamanan domestik maupun internasional, serta akibat mengikisnya komitmen publik terhadap nilai-nilai etis dan spiritual yang penting bagi kesejahteraan individu dan masyarakat.”. Bukti ini dapat menjadi kritik pada paham sekularisasi yang menyatakan agama harus dipisahkan dari urusan manusia, namun pada kenyataannya agama memegang peranan besar dalam konstruksi perilaku manusia dan dapat digunakan sebagai bentuk atau upaya menjaga perdamaian dunia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pemaparan data yang dilakukan secara naratif. Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah R20 sebagai forum para pemuka agama/ kepercayaan yang peserta utamanya berasal dari negara-negara G20. Unit analisis ini ditetapkan guna untuk memudahkan penelitian dalam menentukan aktor sebagai fokus dari penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder melalui analisis literatur dan studi pustaka. Data tersebut berasal jurnal dan buku yang kredibel seperti literatur yang berjudul *Kebangkitan Agama dan Prasangka Sekuler dalam Kajian Hubungan Internasional* karya Jatmiko, *Sekularisasi dan Sekularisme Agama. Jurnal Agama Dan Lintas Budaya* karya Pachoer, dan *Introduction to International Relations: Theories and Approaches.*: Oxford University Press karya Jackson & Sorensen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis literatur dan studi pustaka dengan mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi berupa fakta untuk mendukung proses penelitian. Sumber data yang telah diperoleh akan dipilih lagi untuk menentukan pengelompokan antara fakta dan opini sehingga penelitian ini dapat mengambil data yang kredibel dan pengelompokan data-data fakta yang terpilih akan disusun kembali menjadi kalimat yang baik (Pachoer, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Teori sekularisasi ini menyatakan bahwa modernisasi sesungguhnya menyebabkan kemerosotan peran agama dalam ranah masyarakat maupun individu (Wahyuni, 2021). Bentuk dari kemerosotan peran ini dapat kita lihat melalui beberapa fenomena, seperti dimana relevansi kata ‘kafir’ bukanlah suatu hal yang bagus bagi sistem negara bangsa, apalagi dengan keadaan negara Indonesia yang memiliki keberagaman agama. Eksistensi agama yang dinilai akan berkurang juga dikatakan oleh Auguste Comte, yang mengumumkan bahwa, sebagai bentuk akibat dari terjadinya modernisasi, masyarakat akan bergerak melampaui "tahap teologis" pada evolusi sosial dan saat itu agama akan mulai ditinggalkan. Tahap teologis sendiri merupakan periode yang berlangsung lama dalam sejarah kehidupan manusia dan banyak disebut sebagai masa kekanakan dari intelegensi manusia. Pada tahap ini terdapat kepercayaan manusia terhadap kekuatan-kekuatan supranatural yang berasal dari kekuatan zat adikodrati/jimat/kekuatan yang berasal dari

luar diri individu atau dari kekuatan tokoh-tokoh agamis yang menjadi panutan oleh manusia. Hal ini tidak lain dan tidak bukan juga disebabkan oleh yang namanya modernitas atau modernisasi, seperti yang telah dibahas sebelumnya, modernitas atau modernisasi memiliki fokus pada kesadaran individu dan rasionalitas. Kepercayaan, keyakinan, atau tindakan memeluk suatu agama dikatakan bertentangan dengan otonomi manusia yang bebas dan mulai berkembangnya interpretasi ilmiah dan kemajuan teknologi memerosotkan bentuk 'Tuhan' dari kehidupan individu. Selain itu terdapat pula pernyataan modernisasi yang bukan hanya berdampak pada perubahan sosial dari bentuk masyarakat, contohnya dari agraris ke industrialis, tetapi proses modernisasi tersebut juga mempengaruhi berbagai nilai dan teknologi yang dapat merubah perilaku, sikap dan pengetahuan masyarakat (Chabibi, 2019)

Dalam lingkup internasional, argumen dukungan kepada sekularisme dapat dilihat pada peristiwa besar yang mengguncang masyarakat global. Peristiwa tersebut adalah 9/11 atau 'Sebelas September 2001'. 9/11 merupakan sebuah kejadian terkait terorisme islam yakni Al-Qaeda (kelompok teroris islam yang mempercayai bahwa kristen dan yahudi Amerika Serikat berkonspirasi untuk menjatuhkan islam) melakukan pengeboman pada gedung *World Trade Center* atau WTC dan peristiwa tersebut pula yang menjadi penanda hingga sekarang akan perang tak berkesudahan terorisme yang berkaitan dengan kepercayaan atau agama. Peristiwa ini memperkuat keyakinan para penganut paham sekuler agama akan selalu berhubungan dengan instabilitas politik, negara kacau dalam interaksi global, fundamentalisme dan terorisme (Jatmiko, 2017). Kita telah memahami bahwa agama dan politik itu erat kaitannya jika dilihat secara historis (Eliawati, 2019). Keterkaitan ini bisa kita telusuri pada aspek keadaan politik internasional terdahulu dan melalui pandangan kajian Hubungan Internasional. Pada masa lalu agama dan politik sangat terintegrasi, otoritas yang ada pada zaman pertengahan tersebar pada hierarki pemimpin agama pada satu sisi dan pemimpin politik pada sisinya lainnya (raja dan semacamnya). Melalui Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa (1618 - 1648) perseteruan antara kaum Protestan melawan kaum Katolik terjadi di seluruh bagian benua tersebut. Berakhirnya perang dengan Perdamaian Westphalia, menunjukkan era baru yang 'modern' dan menjanjikan kebebasan bagi kelompok politik penguasa Eropa dari otoritas agama-politik Christendom, hal ini menjadikan kekuasaan terfokus pada titik Raja dan pemerintahannya pada saat tersebut dan gereja berada dibawah kontrol negara (Sørensen, Møller, & Jackson, 2022).

Peristiwa perubahan kedudukan agama-politik pada era Perdamaian Westphalia menghalau keyakinan agama dari kehidupan publik dan politik. Meski tidak sepenuhnya menghilang, eksistensi agama menjadi urusan pribadi, terpisah dari politik. Peran agama menjadi konsiderasi kesekian dalam perkembangan dunia modern, dan adaptasi nilai agama dalam sistem politik suatu negara tergantung dari penguasa politiknya sendiri. Pemisahan peranan agama dalam konteks negara berdaulat yang modern cenderung telah menjadi model bagi banyak negara di dunia. Masyarakat barat berorientasi untuk berpikir modernisasi terus menerus hingga melibatkan sekularisasi. Dikatakan bahwa ketika suatu negara mengikuti jalur modernisasi barat maka lambat laun dan secara otomatis negara tersebut akan melakukan pemisahan peranan agama dari politik (Sørensen et al., 2022). Menurut pakar sosiologi Jose Casanova, teori sekularisasi memiliki kekuatan yang besar sehingga bisa saja 'menjadi satu satunya teori yang mampu mendapatkan status paradigma sebenarnya dalam ilmu pengetahuan sosial modern'.

Klaim sekularisasi yang semakin diperbincangkan ini pun mengundang pertanyaan, dari realitanya agama tidak pernah meninggalkan 'panggung', tidak juga di dunia barat (Sørensen et al., 2022). Agama tetap memiliki peranannya dalam mempengaruhi agenda politik di negara terkait. Jika bisa mengambil contoh terdapat Amerika Serikat yang mana terdapat basis pendukung partai politik yang berasal dari kelompok kristen evangelis (Fuad,

2009). Beberapa waktu setelah apa yang dikemukakan oleh Casanova, terdapat pakar sosiologi lain yang menulis ‘asumsi bahwa kita berada di dunia yang tersekularisasi adalah hal yang tidak benar. Dewasa ini, dunia dengan beberapa pengecualian tempat yang saya akan mendatangi sekarang, adalah agama yang sama hebatnya seperti di masa lalu, dan pada beberapa tempat bahkan terasa lebih. Hal ini berarti seluruh badan literatur yang diberi nama ‘teori sekularisasi’ oleh pakar sejarah dan ilmu sosial lain adalah salah.’, pakar sosiologi tersebut adalah Peter Berger di tahun 1999. Argumentasi lain yang mendukung keberlanjutan peranan agama dalam politik adalah tesis ‘Benturan Peradaban’ oleh Samuel Huntington (1993, 1996). Huntington membicarakan terkait ‘peradaban’ namun inti dari suatu peradaban itu adalah agama ; ‘Hingga tingkatan yang sangat tinggi, peradaban utama dalam sejarah manusia diidentifikasi dengan agama dunia yang hebat’. Pernyataan Huntington menyinggung signifikansi budaya, yang berarti agama yang utama dan paling utama dalam politik internasional. Huntington juga menyatakan ‘konflik antara kelompok dalam peradaban yang berbeda akan menjadi lebih sering, lebih menderita, dan lebih keras daripada konflik antara kelompok - kelompok dalam peradaban yang sama’ dalam tesis ‘Benturan Peradaban’ miliknya, hal ini dapat kita kaitkan terkait eksistensi isu konflik agama yang terjadi di lingkup global (Sitorus, 2022).

Hingga saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa agama menjadi elemen penting di dalam kehidupan. Ideologi pemisahan agama dan politik lahir di bangsa Barat yang kemudian berkembang di bangsa Timur membawa ideologi baru. Namun, klaim terkait sekularisasi dalam dunia politik tetap tidak bisa diabaikan begitu saja hingga saat ini. Agama masih dijadikan sebagai dasar dalam meyakinkan suatu kebenaran serta menjadi klaim dalam mempertahankan suatu kepentingan publik maupun individu. Emile Durkheim sebagai tokoh sosiolog berpengaruh pada masanya melahirkan suatu teori, yaitu Teori Fungsionalisme (Hamdi, 2018). Teori ini memandang bahwa semua aspek masyarakat (institusi, peran, norma, organisasi masyarakat, dll) sangat diperlukan dalam menunjang kelangsungan hidup masyarakat dalam jangka yang panjang (Britannica, 2020). Teori ini memiliki pemikiran bahwa masyarakat selalu bekerja sama dalam menjaga tatanan sosial dengan menjaga stabilitas sosial masyarakat, yaitu melalui solidaritas sosial, konsensus sosial yang mengacu pada norma dan nilai bersama di masyarakat, serta menghindari anomie atau kurangnya norma dan nilai. Dengan begitu, peran agama di mata publik masih sangat masif dan juga penting. Agama telah memainkan faktor yang besar dalam berbagai perkembangan sejarah peradaban. Hingga saat ini, agama masih tetap digunakan sebagai rasa identitas serta ideologi bagi individu atau masyarakat dalam bentuk sumber solidaritas dan identitas bagi orang-orang yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu. Agama dijadikan landasan dalam memberikan makna bagi kehidupan, menawarkan otoritas kepada mereka yang berada dibawahnya untuk mencari tahu serta memperkuat moral dan norma sosial yang dianut. Agama memiliki kemampuan yang signifikan dalam mengatasi masalah sosial saat ini, seperti prostitusi, korupsi, perang, ketidakadilan politik, hingga adanya diskriminasi karena menjunjung adanya prinsip moralitas. Fakta menunjukkan bahwa agama memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap politik, lingkungan, sosial maupun ekonomi karena masyarakat mengidentifikasikan diri mereka dengan latar belakang negara tertentu.

Melihat dari penjelasan sebelumnya, peranan agama tentu saja masih terlihat jelas dalam lingkungan politik suatu negara. Dalam permainan dan kehidupan politik negara unsur agama masih sangat mempengaruhi, hal ini berdasarkan kekuatan agama yang dapat ‘mengatur’ massa sesuai ideologi agama yang dipahami. Dengan massa yang bergerak dan melaksanakan kehidupannya dengan acuan agama, pastinya membuat ideologi agama dikedepankan dan kebutuhan mereka harus dipenuhi. Dari sinilah sisi dimana dengan jumlah massa yang besar mau tidak mau akan mempengaruhi kehidupan politik negara dalam bidang pengambilan keputusan. Namun hal tersebut dapat kita lihat pada level negara saja, lantas bagaimana dengan lingkup global atau pada level internasional. Kita

tahu bahwa dalam lingkungan internasional dewasa ini tidak dipengaruhi oleh satu negara saja, meski aktor negara adalah aktor tertinggi dalam politik internasional, tetap saja masih terdapat suatu institusi atau forum internasional yang memiliki keterkaitan dengan banyak negara dan dapat mempengaruhi populasi global. Dalam level internasional pun peranan agama masih eksis dalam politik dunia, melihat tesis dari Samuel Huntington terkait 'Benturan Peradaban' yang pada level kecilnya pasti mengaitkan dengan agama membawa kita pada wacana bahwa setiap negara di dunia pasti memiliki identitas (agama) yang berbeda, dan dengan ini pun terdapat kepentingan yang berbeda. Isu atau konflik agama sudah sangat sering terdengar dan terdapat urgensi untuk mengatur peranan agama dalam politik dunia sebagaimana mestinya (Rahawarin, 2013).

Sebagai salah satu forum keagamaan dari sebuah organisasi multilateral G20, R20 memegang peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan spiritualitas politik global. Eksistensi R20 yang mengaitkan agama dan politik internasional terlihat pada dalam penyelesaian konflik, R20 tidak menyarankan penyelesaian masalah lewat peperangan. R20 berusaha untuk menjadi penengah atau memberikan saran dan bantuan penyelesaian konflik melalui upaya rekonsiliasi. Rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik dapat diartikan dengan upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai dan baik tanpa harus melalui peperangan. Saran untuk melakukan rekonsiliasi ini ditujukan kepada konflik yang terjadi pada agama Hindu dan Islam di India serta konflik antara Kristen dan Islam yang kerap terjadi. Konflik-konflik tersebut menjadi awal terbentuknya rekonsiliasi dalam konflik agama. Selain itu, isu yang menjadi perhatian dalam R20 adalah adanya rekontekstualisasi ajaran-ajaran agama yang problematik dan usang harus diperbaiki agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan agama (Wahyuni, 2021). Contohnya adalah NU menetapkan bahwa kafir dan fikih tidak lagi relevan dalam konteks negara bangsa karena yang ada di dalam negara bangsa adalah warga negara (Mas'ud & Fadllurrohman, 2022). Contoh selanjutnya, dalam kepercayaan katolik adalah Gereja Vatikan merevisi doktrin yang pada awalnya mengatakan bahwa keselamatan hanya berada pada gereja katolik dan telah direvisi menjadi keselamatan juga ada di luar gereja katolik. Melihat contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa peran R20 dalam berlangsungnya keagamaan di negara-negara anggota G20 dilakukan melalui aktor-aktor non negara seperti NU dan gereja vatikan dalam menjadi sarana/ wadah untuk menafsirkan ajaran agama yang terbaru sesuai dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan dapat diterapkan oleh para penganutnya. Melalui eksistensi R20 ini bisa terlihat dengan jelas bahwa peranan agama dalam politik tidak bisa terelakkan, hingga politik dunia atau internasional peranan agama sangat terlihat jelas. Agama yang memiliki kekuatan massa dapat memberikan suatu nilai plus jika dalam membentuk sebuah standar masyarakat global yang damai, di R20 ini digaungkan lagi rekonsiliasi isu agama dan rekontekstualisasi ajaran agama demi mencapai penyelesaian masalah dan perdamaian. Hal ini dapat menyatakan bahwa paham sekularisme tidak relevan dan sesuai di kehidupan politik global.

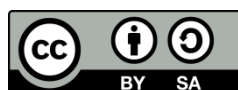
Kesimpulan

Peran agama dan politik merupakan situasi yang sangat kompleks dalam variasi berbagai aspek secara kompleks. Beberapa pernyataan menyatakan mengenai modernisasi dapat menyebabkan merosotnya peran agama dalam masyarakat, namun hal tersebut tidak dapat mendeklarasikan bahwa agama akan sepenuhnya kehilangan relevansi dalam perpolitikan. Dalam berbagai konteks, agama tentunya masih memainkan peran yang penting dan cukup signifikan dalam membentuk suatu kebijakan politik, opini publik, serta identitas politik dari beberapa kelompok serta individu yang menggunakan agama sebagai basis identitas dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, agama juga berperan penting dalam mobilisasi massa serta mendukung gerakan sosial atau politik tertentu. Agama turut berperan dalam interpretasi dan pengaruh individu dan

kelompok tertentu dengan berbagai cara, seperti mendukung partisipasi aktif dalam politik, sementara kelompok lain yang cenderung memisahkan agama dari urusan politik. Sangat penting di dalam masyarakat untuk mempertimbangkan peran agama dalam politik sebagai masalah yang kompleks dan tidak bisa dianggap sebagai masalah yang sederhana. Peran agama dalam politik dapat bervariasi dan adanya pengaruh agama dalam politik tidak berarti adanya kemerosotan peran agama. Dalam lingkup politik internasional, eksistensi keterkaitan agama dan politik sangatlah luas untuk itu aktor yang muncul bukan hanya negara namun adanya institusi dan forum internasional. Melalui R20, forum ini membentuk tujuan eksistensi agama dan politik internasional mengarah kepada perdamaian global dan berusaha menyebarluaskan pandangan menekankan adanya isu agama yang merugikan dalam politik dunia.

Bibliography

- Ahida, Ridha. (2018). *Sekularisasi: Refleksi terhadap Konsep Ketuhanan*. Tajdid.
- Britannica, T. (2020). Editors of encyclopaedia. *Argon. Encyclopedia Britannica*.
- Chabibi, Muhammad. (2019). Hukum Tiga Tahap Auguste Comte dan Kontribusinya terhadap Kajian Sosiologi Dakwah. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 14–26.
- Djafar, Abu Bakar. (2020). Peran Agama dalam Merawat Perbedaan (Islam dan Kebhinekaan di Indonesia). *Prosiding Seminar Nasional Keagamaan*, 1(1).
- Eliawati, Lia. (2019). aspek positif fungsi politik agama. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2(1), 84–108.
- Fuad, Ahmad Nur. (2009). sekularisasi politik Pengalaman Amerika Serikat dan Dunia Islam. *Jurnal Salam*, 12(2).
- Hamdi, Saipul. (2018). *Nahdlatul Wathan di Era Reformasi Agama, Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi*. Pulham Media.
- Jatmiko, Akhmad. (2017). Kebangkitan agama dan prasangka sekuler dalam kajian hubungan internasional. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 8(1), 5–18.
- Mas'ud, Muhamad, & Fadllurrohman, Fadllurrohman. (2022). Sheek Yusuf Al-Makassari's Thoughts on Implementation of Islamic Law Through India. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 2(9), 1881–1893.
- Pachoe, Rd Datoek A. (2016). Sekularisasi dan Sekularisme Agama. *Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, 1(1), 91–102.
- Rahawarin, Yunus. (2013). kerjasama antar umat beragama: studi rekonsiliasi konflik agama di Maluku dan Tual. *Kalam*, 7(1), 95–120.
- Sitorus, Gideon Hasiholan. (2022). Sitorus, G. H. (2022). Sumbangsih Teori Fungsionalis Emile Durkheim Untuk Mewujudkan Agama Sebagai Wacana Performatif Dalam Mewujudkan Solidaritas Di Tengah Pandemi. *Pute Waya: Sociology Of Religion Journal*, 3(1), 52–64. *Pute Waya: Sociology of Religion Journal*, 3(1), 52–64.
- Sørensen, Georg, Møller, Jørgen, & Jackson, Robert H. (2022). *Introduction to international relations: theories and approaches*. Oxford university press.
- Suyanto, Bagong. (2015). *Metode penelitian sosial: Berbagai alternatif pendekatan*. Prenada Media.
- Wahyuni, Dwi. (2021). Melampaui Sekularisasi: Meninjau Ulang Peran Agama di Ruang Publik pada Era Disrupsi. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(2), 87–98.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

